



# Hubungan Kapitalis di Tempat Produksi yang Tersembunyi: Studi Kasus Petani Kakao Sertifikasi di Desa Piriang Tapiko

A. Mappatunru<sup>1\*</sup>, Citra N Fariaty<sup>2</sup>, Sriwiyata Ismail  
Zainuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,&3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Majene,  
Indonesia

\*Email: [andimappatunru@unsulbar.ac.id](mailto:andimappatunru@unsulbar.ac.id)

**Submitted:** February 19, 2024

**Accepted:** April 14, 2024

**Published:** October 14, 2024

**Abstract:** *This paper aims to depict the formation of capitalist relations in the hidden abode of production within the cocoa sector in the Village of Piriang Tapiko. The research is based on data collected from field research using an explanatory qualitative method. Employing a Marxist political economy approach, this study reveals that: (1) The presence of cocoa plants has ensnared local farmers in the village of Piriang Tapiko in commodification of subsistence. However, this entanglement does not necessarily subject them to class differentiation, as believed by some Marxist scholars. (2) Despite undergoing commodification of subsistence and full integration into market relations, cocoa farmers in the village of Piriang Tapiko can still access the market freely and control their work processes and its outcomes independently. The fertile forest land shapes their self-reliance in confronting market forces. (3) The plummeting cocoa productivity due to plant diseases has separated them from control over the means of production and their output, ensnaring them in a concealed capitalist relation as unpaid labor through outsourcing mechanisms hierarchically controlled by Nestle in the certified cocoa commodity chain. Ultimately, the formation of capitalist relations in the village of Piriang Tapiko adds a unique dimension to the trajectory of capitalism's development in diverse contexts.*

**Keywords:** *commodification of subsistence; certification; labor control; capitalist relations.*

## A. PENDAHULUAN

Sebelum era komoditas, warga lokal di Desa Piriang Tapiko merupakan petani subsisten yang menggantungkan hidupnya pada tanaman non komoditas. Di era komoditas, warga lokal mulai bergantung pada hubungan pasar dan memperoleh uang dengan cara menanam komoditas tanaman keras, seperti kopi, kemiri, dan kakao. Ketergantungan tersebut berlangsung hingga memasuki era kejayaan kakao (awal dekade 80 an hingga akhir dekade 90 an). Kejayaan ini menjadi penanda di mana masyarakat Piriang Tapiko mengalami apa yang Henry Bernstein sebut sebagai komodifikasi subsistensi, yakni hilangnya kapasitas petani kecil untuk mereproduksi diri di luar dari relasi pasar dan komoditas (Bernstein, 2019: 47). Sejak saat itu, wilayah ini telah menjadi bagian dari bumi selatan, yang berperan penting untuk

menjamin keberlangsungan kapital perusahaan multinasional yang berpusat di bumi utara.

Di era kejayaan kakao, komodifikasi subsistensi tidak membuat petani kakao Piriang Tapiko tunduk pada diferensiasi kelas sebagaimana yang dijelaskan dalam sejumlah literatur marxis terkait perkembangan kapitalisme di pedesaan. Jika dapat dikatakan, proses diferensiasi kelas di wilayah ini berjalan lambat. Kendatipun dapat ditemukan segelintir petani kakao kapitalis yang mempekerjakan buruh tani lokal, mayoritas petani kakao di Desa Piriang Tapiko merupakan petani berbasis keluarga yang tidak bergantung pada tenaga kerja upahan. Sementara itu, karakter petani keluarga yang diidentikkan dengan beragam keseimbangan internal, membuat mereka memiliki ketahanan yang kuat dari gempuran kapitalisme, hal itu selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Ploeg (2019) relatif sulit ditemukan di desa ini. Hingga kini, petani kakao di Desa Piriang Tapiko bertahan sebagai entitas petani yang homogen dan otonom. Jika mengacu pada definisi “kapital sebagai relasi sosial produksi”, hampir tidak ditemukan hubungan kapitalis di wilayah ini. Dengan kata lain, kapitalisme belum sepenuhnya menghancurkan hubungan pertanian non-kapitalis, artinya permasalahan agraria (*agrarian question*) sama sekali belum terpecahkan di wilayah tersebut (Byres, 1986).

Sementara itu, fenomena tersebut sekilas tergambar seperti ketangguhan kaum tani dalam menghadapi ancaman eksternal yang seringkali digambarkan secara romantik oleh para pemikir Chayanovian. Ketangguhan tersebut disebabkan oleh kaum tani yang bekerja dengan logika sehingga memungkinkan mereka menahan kekuatan ekspansi kapitalisme (Araghi, 1995: 342). Selain didukung oleh praktik-praktik tradisional yang masih bertahan, proses kerja dalam aktivitas pertanian petani kakao Piriang Tapiko sama sekali tidak bergantung pada kerja upahan. Ekonomi mereka, seperti yang diyakini Chayanov, merupakan ekonomi berbasis keluarga yang berpusat pada pengerahan tenaga kerja keluarga (Bernstein, 2009). Seperti yang diyakini Ploeg (2019), karena tidak ada upah yang dibayarkan, dinamika usaha tani semacam itu tidak dicirikan oleh motif pencarian keuntungan, melainkan untuk membangun keseimbangan internal dalam rumah tangga petani, yakni keseimbangan antara tenaga kerja dan konsumen; antara jerih payah dan faedah. Hal tersebut menjadi dasar bagi pemikir Chayanovian mengapa kaum tani di pedesaan masih bertahan dan cenderung bertambah.

Meskipun demikian, riset ini berangkat dari tiga pendekatan yang memiliki posisi berlawanan dengan pandangan Chayanovian (Araghi, 1995). *Pertama*, jika petani masih bertahan, itu karena ia dibutuhkan oleh kapital sebagai tenaga kerja murah. Keberadaan mereka berfungsi untuk menjaga reproduksi kapital (Kautsky, 1988). *Kedua*, apa yang nampak secara empirik tidak menjelaskan kenyataan seutuhnya. Petani yang kelihatannya tidak terdiferensiasi sebenarnya mengalami diferensiasi yang tersamar (*differentiation in disguise*). Pada kenyataannya, petani sebagai produsen komoditas pertanian adalah pekerja upahan yang tersembunyi

(*concealed wage workers*) (Banaji, 1977). Itulah mengapa pendekatan diferensiasi klasik yang mendasarkan dirinya pada kepemilikan lahan menjadi kurang memadai di sini. Ketiga, perkembangan kapitalisme yang terjadi di wilayah berbeda dapat terjadi melalui jalur yang beragam (Byres, 1997).

Perkembangan kapitalisme di Desa Piriang Tapiko menunjukkan suatu jalur (*path*) yang berbeda dari jalur lain, yang telah diidentifikasi dalam beberapa penelitian mengenai perkembangan kapitalisme di Pedesaan dalam konteks Indonesia. Perkembangan ini tidak melalui proses kekerasan negara dan swasta terhadap warga lokal, seperti yang dijelaskan dalam riset Mappatunru (2020) mengenai sejarah perkembangan kapitalisme kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah; juga tidak melalui *intimate exclusion* atau eksklusi orang-orang terdekat, seperti yang dijelaskan dalam riset Li (2019) mengenai pembentukan hubungan kapitalis di masyarakat Lauje; dan juga tidak melalui dinamika kelas dan hubungan kapitalis yang intens di kalangan petani kelapa sawit di Sumatera seperti yang dijelaskan dalam riset Habibi (2022). Sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut, pembentukan hubungan kapitalis di Desa Piriang Tapiko didorong oleh akumulasi primitif yang tersamar dalam mekanisme institusional yang ditunggangi oleh perusahaan multinasional melalui program sertifikasi kakao berkelanjutan. Berdasarkan itu, melalui riset ini, kesenjangan (*gap*) tersebut memperoleh signifikansinya dan perlu mendapatkan penyelidikan lebih lanjut. Melalui paradigma *marxist political economy*, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) Mengapa diferensiasi kelas dalam dinamika komodifikasi subsistensi petani kakao di Desa Piriang Tapiko berjalan relatif lambat? (2) Seperti apa hubungan antara kemandirian petani dan pasar bebas? dan (3) Bagaimana rezim kontrol melalui skema sertifikasi membentuk hubungan kapitalis antara petani dan perusahaan?

## B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif eksplanatori (*explanatory research*) yang dilaksanakan di Desa Piriang Tapiko, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar selama bulan Februari hingga April 2022. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan alasan terjadinya peristiwa atau fenomena dan untuk membentuk, memperdalam, mengembangkan, atau menguji teori (Neuman, 2015: 45). Informan dalam penelitian ini adalah aktor yang terlibat dalam rantai nilai komoditas kakao sertifikasi di Desa Piriang Tapiko; petani kakao, tengkulak lokal, pedagang besar resmi (PT. BSS), *Internal Management System* (PT. IAG), dan Barry Callebaut Sulawesi Barat.

Untuk mendapatkan pemahaman dan pengalaman yang mendalam dari informan secara langsung mengenai dinamika produksi dan reproduksi petani kakao, peneliti melakukan *live in* sepanjang Februari dan berinteraksi secara langsung dalam keseharian petani kakao di Desa Piriang Tapiko. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui metode observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan diskusi kelompok terarah (FGD), yang didokumentasikan dalam

bentuk catatan lapangan dan audio rekaman. Keabsahan data-data tersebut diperiksa dengan teknik triangulasi dengan membandingkan data-data dari satu sumber atau metode tertentu dengan data-data yang diperoleh dari sumber atau metode lain. Data-data tersebut kemudian dikondensasi berdasarkan fokus penelitian dan disajikan dalam kerangka teori yang telah dioperasionalkan secara eksplanatori.

## C. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Diferensiasi Kelas

Pemisahan petani dari alat produksinya (tanah)—dan seringkali melalui legitimasi negara—adalah titik berangkat dari kemunculan awal corak produksi kapitalisme atau apa yang Marx istilahkan sebagai *akumulasi primitif* (Marx 2004, 799). Akumulasi primitif memisahkan produsen dari alat-alat produksinya dan mengubah mereka menjadi kelas pekerja upahan yang kemudian menggantungkan hidupnya pada relasi produksi dengan kelas kapitalis (hubungan kapitalis). Polarisasi kelas antara kelas pekerja upahan dan kelas kapitalis merupakan bentuk klasik dari kemunculan kapitalisme dalam konteks Inggris yang dijelaskan Marx dalam *Capital*. Kendati demikian, konteks tersebut tidak dapat digunakan secara serampangan untuk menjelaskan kemunculan kapitalisme pada lokus yang berbeda. Menurut Henry Bernstein (2019), Marx tidak menyediakan model umum untuk menjelaskan kemunculan kapitalisme pada lokus yang berbeda.

Berangkat dari pandangan Marx, bagi Lenin (1989), lenyapnya kaum tani di Rusia adalah prasyarat perkembangan kapitalisme di pedesaan. Namun, ketimbang melompat langsung pada tesis polarisasi kelas (pekerja upahan-kapitalis). Bagi Lenin, perkembangan kapitalisme di pedesaan dalam konteks Rusia ditandai dengan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan dan mendorong petani terdiferensiasi ke dalam tiga kategori kelas petani: *Petani miskin*, yaitu petani yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari hasil bertani. *Petani menengah*, yaitu petani yang hanya mampu hidup secara subsisten. *Petani kaya*, yaitu petani yang dapat mengkomersialisasi hasil pertanian mereka dan meraup keuntungan darinya (Lenin, 1964). Henry Bernstein menggunakan kategorisasi Lenin untuk menjelaskan konsekuensi logis dari *komodifikasi subsistensi* terhadap kaum tani dalam konteks kemunculan kapitalisme agraria di pedesaan. Menurut Bernstein (2019: 123), begitu komodifikasi terjadi, timbul kecenderungan diferensiasi petani ke dalam beberapa kelas.

Diferensiasi kelas juga dimungkinkan oleh apa yang Hall *et al* (2020) sebut sebagai *intimate exclusion*, yakni hubungan sosial horizontal antara petani dengan petani lainnya yang saling menyingkirkan satu sama lain dari akses terhadap lahan sebagai upaya untuk mengakumulasi kekayaan. Kekuatan pasar mendorong kaum tani berkompetisi dan saling mengecualikan satu-sama lain. Petani yang tereksklusi bertransformasi menjadi petani *gurem* dan *tunakisma*. Kedua kategori tersebut adalah petani miskin yang tidak memiliki cukup lahan atau sama sekali tidak memiliki lahan

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan menjebak mereka dalam "himpitan reproduksi sederhana". Himpitan tersebut memaksa mereka untuk menjual tenaga kerjanya kepada petani kaya. Sementara itu, keberlangsungan modal petani kaya selalu bergantung kepada curahan tenaga kerja petani miskin. *Kegureman* dan *ketunakismaan* adalah gambaran umum dari fenomena kemiskinan di pedesaan.

## 2. Persistensi Pertanian Berbasis Keluarga

Dalam pendekatan Chayanovian, pertanian berbasis keluarga adalah pertanian yang diusahakan oleh tenaga kerja berbasis keluarga. Pertanian ini digerakkan tanpa upah dan *kapital*, serta tidak berorientasi pada profit. Kriteria tersebut menjadi pembeda antara pertanian berbasis keluarga dengan pertanian kapitalis yang berorientasi keuntungan dan dijalankan oleh tenaga kerja upahan. Menurut Ploeg (2019), prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian kapitalis sama sekali tidak kompatibel diterapkan dalam pertanian berbasis keluarga. Gagasan tentang "modal" dalam pendekatan Chayanovian juga tidak dimaknai sebagai "relasi" sebagaimana yang diyakini oleh penganjur pendekatan diferensiasi kelas. Modal dalam usaha tani keluarga mencakup seluruh alat produksi dan aspek pendukung lainnya. Modalnya tidak untuk memproduksi nilai lebih sebagaimana perekonomian kapitalis. Modal adalah modal keluarga dan dikendalikan penuh oleh keluarga (Ploeg, 2019). Perbedaan tersebut yang mendasari anggapan bahwa pertanian berbasis keluarga memiliki *keseimbangan internal* yang membuat mereka secara lentur dapat menyesuaikan diri dari faktor-faktor eksternal yang mengancam. Bukti yang sering disodorkan para penganjur Chayanovian adalah pertanian berbasis keluarga persisten di tengah gempuran kapital.

Menurut pendekatan ini, kategorisasi kelas berdasarkan luas lahan bersifat temporal. Artinya, keadaan tersebut dipengaruhi oleh rasio anggota keluarga (pekerja) yang terus bertambah. Semakin bertambah anggota keluarga, semakin banyak mulut yang mesti disuapi. Oleh karena itu, kebutuhan atas lahan pun semakin bertambah, sehingga luas pertanian akan ditingkatkan hingga anak-anak mereka dewasa dan merintis usaha tani mereka sendiri. Pada titik itu, luas usaha tani mereka akan menyusut kembali (Ploeg, 2019: 107). Chayanov menyebut siklus demografi tersebut dengan istilah "diferensiasi demografis" sebagai kritik terhadap "diferensiasi kelas". Menurut Ploeg (2019), di belahan dunia manapun (sejak dasawarsa 1880-an), diferensiasi kelas tidak terjadi secara tegas dalam pertanian. Tantangan besar bagi pendekatan ini adalah sejauh mana ia dapat bertahan dalam gempuran kapital dan dilema pertanahan yang ditunggangi oleh *kuasa eksklusif*, sebagaimana yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Hall *et. al* (2020).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Komodifikasi Subsistensi

Pilihan lain yang muncul dari desakan kekuatan pasar pada awal dekade 1970 an memperkenalkan warga Piriang Tapiko dengan profitabilitas tanaman kakao, dan mendorong mereka membudidayakan tanaman ini secara bertahap. Awal era 1990 an hingga awal 2000 an menjadi puncak kejayaan kakao di mana warga Piriang Tapiko sangat menikmati keuntungan ekonomi dari tanaman ini, suatu keberkahan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya dari tanaman lain yang mereka pernah budidayakan. Berbanding terbalik dengan temuan Scott (1983), dalam studinya tentang moral subsistensi petani di Asia Tenggara, antusiasme dan kesukarelaan mereka ketika berpindah pada pola tanaman komoditas menunjukkan bahwa desakan pasar pada akhirnya adalah tuntutan moral.

Selain karena tingginya permintaan biji kakao di pasar global, kejayaan tanaman ini juga dipengaruhi oleh faktor alam. Hutan tropis adalah prasyarat alamiah (*biological basis*) yang paling mendasar dalam siklus kehidupan kakao (Monde, 2009). Fungsi hutan tropis memberikan serangkaian manfaat alamiah bagi tanaman kakao yang ditanam di area hutan yang baru dibuka. Ruf (1998) dan Li (2002) menyebut serangkaian manfaat ini sebagai *forest rent* atau *initial subsidy*. Meski begitu, pola monokultur tanaman kakao yang berlangsung lama mengakibatkan *forest rent* berangsur berkurang (*consumption of forest rent*), sehingga tanaman ini semakin rentan terjangkit penyakit tanaman. Tidak hanya itu, perubahan tersebut juga menciptakan *differential rent forest*, yakni perbedaan biaya produksi antara tanaman kakao yang baru ditanam di kawasan hutan yang baru dibuka dan tanaman kakao yang telah berusia tua. Semakin lama *forest rent* dikonsumsi oleh tanaman monokultur berskala luas, semakin besar biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani, dan semakin besar pula kebutuhan mereka terhadap uang untuk mereproduksi diri.

Guncangan akibat kejatuhan kakao yang sudah mulai terasa pada akhir tahun 2010 an mengakibatkan petani kakao di Desa Piriang Tapiko terjerembab ke dalam situasi yang tidak menentu. Kapitalisme global di sektor kakao telah mengubah secara radikal karakter sosial petani pra-kapitalisme. Pertanian tidak lagi dicirikan sebagai aktivitas yang sangat lokal dan tradisional. Pertanian telah beroperasi melalui pembagian tenaga kerja global maupun nasional (hingga ke lokal), sirkuit kapital, rantai komoditas, perubahan-perubahan teknis (teknologi, transportasi, pengolahan industri), dan pasar (Bernstein, 2006: 454). Perkembangan tersebut mengubah petani menjadi produsen komoditas skala kecil (*Petty Commodity Production*), yang cepat atau lambat akan tunduk pada proses diferensiasi kelas dan mengalami apa yang disebut oleh Henry Bernstein sebagai komodifikasi subsistensi. Kejatuhan produktivitas kakao karena serangan penyakit tanaman kronis yang mengakibatkan penghasilan mereka dari tanaman ini tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka terpaksa bergantung pada aktivitas di luar pertanian atau

sekadar menekan biaya konsumsi untuk bertahan hidup. “*Segala apa-apa dialli nasang, tapi inna tau maala doi* (segala hal dibeli menggunakan uang, tapi di mana kami mendapatkan uang),” ucap seorang petani kakao di Dusun Bulo Pamoso.

Untuk dapat dikatakan cukup, Indah, seorang petani kakao menengah juga menggantungkan hidupnya pada remitansi dari dua orang anak remaja laki-lakinya yang bekerja sebagai buruh migran. Sejak suaminya meninggal dunia, Indah menanggung beban ganda sebagai pekerja domestik sekaligus sebagai petani kakao. Akibat beban ganda, kebun kakao miliknya tidak terawat dengan baik, yang kemudian berdampak secara signifikan pada kemampuan rumah tangganya untuk mereproduksi diri. Tidak jauh dari kediaman Indah, Ali Ikhsan, petani kakao menengah juga bekerja sebagai buruh migran di Kalimantan, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari di kampung. Menjadi buruh migran adalah aktivitas di luar pertanian yang jamak dilakukan oleh masyarakat Piriang Tapiko sejak dulu dan berlangsung hingga kini untuk mencukupi kekurangan penghasilan dari aktivitas pertanian. Kombinasi antara keduanya, dibutuhkan untuk mencegah mereka mengalami himpitan reproduksi sederhana.

Kendati komodifikasi subsistensi menjerumuskan sejumlah petani kakao di Desa Piriang Tapiko ke dalam situasi yang rumit seperti dalam kasus Indah dan Ali, proses diferensiasi kelas petani di desa ini justru berjalan sangat lambat. Hal tersebut jauh berbeda dari apa yang ditemukan Tania Li (2020) melalui kisah Pak Kasar dalam studinya tentang pembentukan hubungan kapitalis di perbukitan Lauje. Menurut Li (2020: 21), kemiskinan yang dialami Kasar berjaln kelindan dengan kesejahteraan para tetangganya. Diferensiasi kelas di perbukitan Lauje terjadi melalui proses *intimate exclusion*, yakni hubungan sosial horizontal (petani kecil, tetangga, dan kerabatnya) yang saling menyingkirkan satu sama lain terhadap akses pada lahan sebagai bagian dari cara untuk mengakumulasi kapital (Hall, Hirsch, dan Li, 2020). Tidak hanya warga lokal, dalam studi tersebut peran pendatang juga mendorong proses pembentukan kelas melalui penyingkiran sehari-hari warga pendatang terhadap warga lokal. Berbanding terbalik dengan temuan tersebut, dinamika petani kakao di Desa Piriang Tapiko adalah dinamika warga lokal. Mayoritas pemilik lahan di Desa Piriang Tapiko adalah warga lokal. Mereka masih berpegang teguh pada prinsip *messa kanne iya nasang disiola-olai* (kami berasal dari satu leluhur yang sama).

Meskipun perkembangan awal tanaman kakao di kedua wilayah (Lauje dan Piriang) tersebut dimulai pada dekade yang sama, tidak ditemukan kompetisi sengit antara warga lokal dan pendatang, maupun antara sesama warga lokal, dalam upaya akumulasi lahan. Pembentukan kelas justru dapat terjadi melalui cara yang berbeda seperti dalam kasus Nadirman, seorang petani gurem yang kadangkala menjual tenaga kerjanya sebagai buruh tani di kebun milik tetangganya. Sebelum menikah, Nadirman adalah tenaga kerja keluarga sekaligus buruh migran musiman, seperti dalam kasus Indah dan Ali. Setelah menikah, Nadirman memperoleh warisan secuil kebun kakao dari kedua orang tuanya dan kini menggantungkan hidup padanya.

Fenomena ini sekilas mirip dengan apa yang diyakini Chayanov sebagai diferensiasi demografi, yaitu volume usaha tani petani berubah mengikuti fase perkembangan keluarga: semakin banyak mulut yang butuh disuapi oleh sekian banyak tangan, makin luas pula lahan yang digarap (Chayanov, 1966 & Ploeg, 2019). Jika diamati lebih dalam, Nadirman sebenarnya tidak mengalami diferensiasi demografi karena jumlah mulut yang butuh disuapi justru berkembang melebihi luas lahan yang tersedia. Tentu saja Nadirman memperoleh warisan lahan dari kedua orang tuanya, namun luas lahan tersebut tidak sebanding dengan mulut yang mesti ia suapi. Bukan diferensiasi demografi, Nadirman justru mengalami diferensiasi menjadi kelas petani gurem.

Guncangan dan ketidakmenentuan pada tanaman kakao tidak mendesak para petani kakao di Desa Piriang Tapiko untuk segera melepas tanahnya. Petani yang cukup sejahtera juga tidak begitu bergairah memperbanyak lahan untuk mengakumulasi tanah lebih banyak. Tentu saja jual beli lahan di antara warga lokal dan praktik utang juga lumrah ditemui di desa ini, namun praktik-praktik tersebut belum cukup kuat untuk mendorong proses diferensiasi secara pesat. Berdasarkan Statistik Desa (2019), seluruh rumah tangga petani di Desa Piriang Tapiko adalah petani yang berlahan, dan sebagian besar dari mereka memiliki lahan di bawah 10 hektar. Meskipun data terperinci tentang pola penguasaan lahan perkebunan kakao di Desa Piriang Tapiko cukup sulit ditemukan, keberadaan petani kaya dan tunakisma juga sulit ditemukan di desa ini. Hal ini menunjukkan mayoritas petani kakao di Desa Piriang Tapiko adalah petani kecil-menengah. Meski begitu, tidak sulit menemukan petani gurem seperti Nadirman di Desa tersebut, meskipun jumlahnya tidak seberapa. Ini juga menunjukkan bahwa proses diferensiasi bukan benar-benar tidak terjadi, hanya saja berjalan lambat.

Proses diferensiasi yang lambat ini dihambat oleh beberapa faktor internal. Densitas populasi yang rendah dan tanah hutan yang luas cenderung menghambat proses kelangkaan lahan, akhirnya warga lokal tidak merasa kekurangan lahan untuk bertani. Mereka masih memanfaatkan dan melakukan aktivitas pertanian secara sembunyi-sembunyi dalam kawasan hutan yang kini berstatus sebagai hutan lindung, seperti yang dilakukan oleh Sulli dan anaknya, Kasriadi, petani keluarga yang melakukan aktivitas pertanian di dalam kawasan. Selain itu, tidak semua elemen sosial dalam masyarakat Piriang Tapiko mengalami komodifikasi. Mereka masih mengandalkan sebagian pengaturan tradisional yang dipraktikkan sejak era subsistensi sebagai mekanisme bertahan hidup. Temuan ini relevan dengan konsep keseimbangan internal untuk menggambarkan kegigihan kaum tani dari ancaman eksternal, sebagaimana yang diyakini dalam tradisi Chayanovian.

Menurut Ploeg (2019), pertanian petani memiliki kemampuan internal dalam mengatasi ketidakpastian dan ketidakseimbangan. Sejalan dengan itu, meskipun tanaman kakao adalah sumber pendapatan utama bagi masyarakat Piriang Tapiko, mereka menyadari dengan baik bahwa bergantung sepenuhnya pada tanaman ini

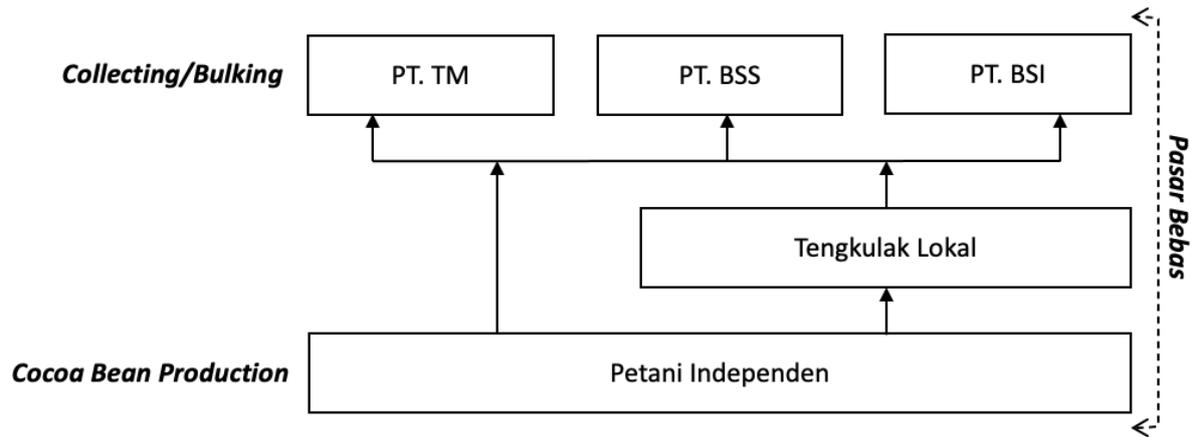
membawa risiko yang lebih berat. Oleh karena itu, mereka juga melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam tanaman komersial lainnya. Satu faktor lain yang juga menentukan, adalah mayoritas masyarakat Piriang Tapiko mengalokasikan separuh dari lahan mereka untuk pertanian padi ladang. Hingga era komoditas, karakter sosial padi ladang sebagai tanaman non-komoditas tidak pernah berubah. Di tengah ketidakpastian tanaman kakao dan ketergantungan petani pada uang, padi ladang berfungsi sebagai pereda nyeri dari himpitan himpitan reproduksi sederhana.

Selain itu, masyarakat Piriang Tapiko masih mempraktikkan pengaturan tradisional yang disebut *maduluang*. Pengaturan ini merupakan bentuk pengeralahan tenaga kerja kolektif, di mana setiap anggota dalam satu kelompok tani menerima subsidi dua jam kerja dari setiap anggota lainnya. Artinya, setiap petani secara bergiliran berhak mendapatkan dua jam kerja dari setiap anggota kelompok tani. Sistem kerja ini dianggap efektif dalam mengefisienkan waktu dan proses kerja petani kakao. *Maduluang* juga menunjukkan bahwa akumulasi kerja yang diperlukan dalam aktivitas pengelolaan perkebunan kakao di Desa Piriang Tapiko sepenuhnya digerakkan oleh kekuatan produksi petani menengah berbasis keluarga, sehingga jasa buruh tani hampir tidak diperlukan. Dalam masa-masa sulit, kedua pengaturan tradisional ini menjadi katup pengaman sosial bagi masyarakat Piriang Tapiko.

Elemen-elemen tradisional menjadi begitu penting dalam dinamika petani kakao di Desa Piriang Tapiko dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal dari kekuatan pasar setelah mereka mengalami komodifikasi subsistensi. Ketegangan di antara keduanya mewarnai momen transisi yang cenderung mengarah pada dominasi kapital. Cepat atau lambat, kapital akan melahap semua elemen tradisional yang dianggap menghambat kepentingannya.

#### **b. Kemandirian Petani dan Pasar bebas**

Di era pra Gernas, petani kakao di Desa Piriang Tapiko terlibat aktivitas jual beli biji kakao dalam pasar domestik yang relatif bebas. Biji kakao yang mereka hasilkan disuplai kepada tiga pedagang besar domestik, di antaranya PT. TMS, PT. BSS, dan PT. BS, baik melalui penjualan langsung maupun melalui perantara tengkulak. Ketiga perusahaan ini, berkompetisi secara bebas untuk memperoleh biji kakao dari petani yang juga secara bebas menjual biji kakao nya, kepada pembeli mana yang menawarkan harga terbaik. Sementara itu, petani kakao di Desa Piriang Tapiko masih membudidayakan tanaman kakao secara otodidak. Pengetahuan yang alakadarnya itu, dimungkinkan karena aktivitas pertanian yang hampir sepenuhnya bergantung pada kondisi alam. Tanah hutan yang subur menyediakan subsidi awal untuk tanaman kakao mereka, sehingga mereka relatif tidak memerlukan pengetahuan teknis pertanian modern, teknologi pertanian mutakhir, intervensi pupuk kimia, maupun biaya produksi yang tinggi untuk menjaga produktivitas tanaman kakaonya.



**Gambar. 2 Hubungan Pasar Bebas dalam Rantai Pasok Biji Kakao Pra-Sertifikasi**

Sumber: Olahan Data Lapangan (2022)

Kendatipun aktivitas produksi dan reproduksi petani kakao Piriang Tapiko hampir sepenuhnya telah bergantung pada pasar komoditas biji kakao global, mereka sama sekali belum terjerat ikatan kapital di level domestik. Karakter kemandirian itu, membuat mereka belum memenuhi dua prasyarat minimal yang diperlukan, agar mereka dapat dikategorikan sebagai kapital (Marx, 2004). *Pertama*, proses produksi biji kakao mereka tidak didasarkan pada kekuasaan dan kontrol langsung atas kerja oleh kapitalis. Sebagai petani berbasis keluarga, kerja dan hasil kerjanya menjadi milik mereka sendiri, yang dapat di pasarkan secara bebas, dan hasilnya pun bisa dinikmati sendiri. *Kedua*, tidak ada hubungan paksa dalam proses kerja mereka. Tentu saja, paksaan samar dari kekuatan pasar membuat mereka harus bekerja sepanjang hari. Secara teknis, paksaan tersebut belum mencapai derajat yang memungkinkan terbentuknya hubungan kapitalis di antara mereka, sehingga dalam proses kerja tidak dimungkinkan terjadinya eksploitasi. Di samping itu, proses kerja juga tidak didorong oleh kontrol teknis yang termekanisasi secara modern dan juga tidak terikat oleh kontrol birokratis hukum perusahaan.

Jatuhnya produktivitas tanaman kakao merupakan imbas dari serangan penyakit tanaman, sehingga karakter kemandirian petani kakao di Desa Piriang Tapiko perlahan menghilang. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia merespon pasang surut produktivitas kakao nasional melalui satu paket kebijakan yang dinamai Gernas Kakao (Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao) yang mencakup beberapa program ambisius (Neilson, 2008). Kebijakan ini mendapat sambutan hangat dari pelaku bisnis internasional. Namun, sambutan tersebut mendapat respon yang dingin dari Pemerintah Indonesia. Alih-alih menggandeng kepentingan perusahaan multinasional dan lembaga internasional, Pemerintah Indonesia justru lebih memprioritaskan peran pemerintah daerah dan ICCRI sebagai mitra resmi dalam implementasi kebijakan tersebut (Hafid, 2017).

Era Gernas menandai berakhirnya era kemandirian petani kakao. Untuk pertama kalinya, petani kakao Indonesia diperkenalkan dengan praktik pertanian yang baik melalui pengenalan penggunaan pupuk kimia dan metode sambung

samping dan pucuk. Menurut penuturan sejumlah petani kakao di Desa Piriang Tapiko, keefektifan kebijakan ini tidak berlangsung lama. Dalam periode 2010-2014, produksi kakao nasional justru menurun dan jauh dari angka yang ditargetkan pemerintah. Gernas kakao akhirnya dianggap gagal oleh sejumlah kalangan. Menurut Palinrungi (2016) dan Ismail (2019), kegagalan tersebut disebabkan oleh konflik kepentingan, aktivitas perburuan rente, dan praktik korupsi. Sementara itu, kebijakan ini membuat petani kakao di Desa Piriang Tapiko kini bergantung pada penggunaan pupuk kimia. Jatuhnya produktivitas kakao berimplikasi secara langsung terhadap tingginya biaya produksi. Meski begitu, hilangnya karakter kemandirian tersebut belum juga dapat menjerumuskan mereka ke dalam relasi kapitalis. Mereka tetap menjalani aktivitas jual-beli dalam pasar domestik yang relatif bebas, meski dalam kondisi yang tidak menentu.

Di sisi lain, kemandirian mereka di level domestik juga tidak bebas dari cengkeraman pasar global yang dikontrol secara tidak langsung oleh segelintir perusahaan multinasional. Sebagai produsen kakao terbesar ke tujuh di dunia (Kementan, 2022), petani kakao Indonesia memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan kapital sejumlah perusahaan besar yang berpusat di bumi utara. Fluktuasi produktivitas tanaman kakao akibat serangan penyakit tanaman yang telah terjadi lebih dari satu dekade terakhir dan rapuhnya tata kelola pemerintah di sektor perkebunan kakao, mendorong perusahaan-perusahaan multinasional terlibat jauh lebih ke bawah untuk mengatasi ketidakpastian pasokan biji kakao di level hulu melalui mekanisme kontrol yang dioperasikan dengan mantra “berkelanjutan”. Keterlibatan tersebut memicu munculnya pasar kakao berkelanjutan sejak tahun 2010 (Hafid, 2017). Sejak satu dekade terakhir, sejumlah perusahaan multinasional menjalin hubungan langsung dengan petani kakao di Indonesia dengan beragam label program kakao berkelanjutan yang memuat beragam prinsip, kriteria, pengetahuan teknis untuk mewujudkan keseimbangan antara keberlanjutan kapital, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan keluarga petani kakao.

### **c. Rezim Kontrol**

Sejak tahun 2012 hingga kini, 279 keluarga pekebun kakao di Desa Piriang Tapiko telah menjadi petani kakao tersertifikasi sekaligus pemasok resmi biji kakao sertifikasi kepada Nestle. Pada dasarnya, skema sertifikasi menggambarkan hubungan produksi dalam bentuk ikatan kontrak antara petani sebagai produsen langsung, dan perusahaan sebagai pembeli resmi dalam suatu konsep yang dapat disebut *contract farming* (lihat Bachriadi 1995, Nino, dan Oya 2021). Melalui Barry Callebaut, Nestle memegang kendali rantai pasok komoditas kakao sertifikasi di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan berpedoman pada standar pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture standard*), yang terdiri dari pedoman rantai pasok (*supply chain requirements*) dan pedoman kebun (*farm requirements*) yang ditetapkan oleh Rainforest Alliance (lembaga sertifikasi internasional), BC melakukan evaluasi dan kontrol kerja terhadap pekebun kakao sertifikasi melalui

mekanisme alihdaya. Skema ini, sebagaimana dikatakan Suwandi (2022), merupakan mekanisme bagi perusahaan inti untuk mengevaluasi dan melakukan reorganisasi proses kerja dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Suwandi (2022) juga menjelaskan, bahwa tujuan utama dalam mekanisme kontrol semacam ini adalah meningkatkan produktivitas rata-rata dari keseluruhan rantai produksi dan memperoleh tenaga kerja yang lebih murah. Era sertifikasi kakao menandai peralihan dari era otonomi petani ke rezim kontrol. Sejak tersertifikasi, kebebasan 279 keluarga petani kakao di Desa Piriang Tapiko untuk menjual biji kakao mereka di pasar domestik diregulasi oleh kontrol pasar, yakni kewajiban yang mengharuskan mereka menjual biji kakaonya kepada tengkulak resmi atau menjualnya langsung kepada pedagang besar resmi, meski pembeli lain menawarkan harga yang lebih tinggi. Kontrol pasar berfungsi untuk menjamin kepastian pasar dan bertujuan untuk menjamin keterlacakan (*traceability*) biji kakao sertifikasi di level hulu.

Kontrol pasar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrol birokratis, yakni jenis kontrol di mana petani sertifikasi diatur oleh kriteria dan aturan teknis yang ditetapkan oleh Rainforest Alliance yang tertulis dalam dokumen pedoman kebun (2023) dan pedoman rantai pasok (2023) sebagai *code of conduct* yang wajib dipatuhi oleh petani sertifikasi. Kontrol ini menciptakan kontrol pengetahuan yang dikonsepsikan dalam *Good Agricultural Practice* (GAPs). Ketiga kontrol tersebut mengerucut pada kontrol sederhana, yakni kontrol kerja yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan inti. Implikasinya, karena diikat oleh kontrol yang berlapis, pekebun kakao sertifikasi kehilangan kontrol atas alat produksinya, terkhusus atas tanahnya sendiri. Dalam proses produksi, kapital berkembang ketika ia memperoleh kekuasaan atas kerja dan membentuk hubungan paksa (Marx, 2004: 318). Marx (2004) juga menegaskan, hubungan kapital terbentuk ketika alat produksi, kerja, dan produk kerja sepenuhnya milik kapitalis.

Gagasan Marx tersebut mengonfirmasi, skema sertifikasi kakao merupakan mekanisme akumulasi primitif. Meskipun begitu, akumulasi primitif ini tidak terukir dalam lembaran sejarah manusia dengan tinta darah dan bara sebagaimana yang dituliskan Marx dalam kapital (Marx, 2004), bukan juga akumulasi primitif yang terjadi secara pelan dan diam melalui proses *intimate exclusion* (Li, 2014, Hall et.al., 2020). Apa yang sebenarnya terjadi adalah akumulasi primitif yang tersamar (*primitive accumulation in disguise*): 279 petani kakao sertifikasi di Desa Piriang Tapiko telah terpisah dari alat produksinya (meski tidak benar-benar terpisah), mereka adalah proletar di atas tanahnya sendiri. Mereka mendekati apa yang Banaji (1977) sebut sebagai pekerja upah yang tersembunyi (*concealed wage workers*). Mendekati dalam arti, hubungan kapitalis yang tersamar ini pada kenyataannya tidak didasarkan pada relasi upah, kerja mereka adalah kerja yang dikontrol, tapi tidak diupah (*unpaid labor*). Dalam konteks ini, petani kakao sertifikasi tidak hanya dibutuhkan oleh kapital sebagai tenaga kerja murah, lebih dari itu, mereka

merupakan tenaga kerja cuma-cuma. Hubungan ini justru didasarkan pada hubungan premi, yakni bonus yang akan didapatkan dari setiap kilogram biji kakao sertifikasi yang mereka hasilkan.

Premi merupakan salah satu fitur dalam skema sertifikasi dan menjadi alasan utama mengapa petani kakao di Desa Piriang Tapiko memilih untuk berpartisipasi dan bertahan sejauh ini dalam skema tersebut. Signifikansi premi terhadap ekonomi rumah tangga petani, sangat bergantung pada hasil panen. Semakin tinggi tingkat produksi, semakin besar nominal premi yang akan diterima. Namun, di tengah tren produksi kakao yang menurun, keberadaan premi tidak berpengaruh besar terhadap nilai tukar petani, yang kemudian semakin diperparah oleh politik pemotongan premi yang dilakukan oleh tengkulak resmi. Seorang bekas tengkulak resmi di Dusun Seppong menunturkan, bahwa ia dapat mengakumulasi jutaan rupiah setiap tahun dari potongan premi yang di caplok dari setiap kilogram biji kakao sertifikasi petani. Menurut beberapa studi, premi tidak cukup untuk mengganti intensitas pengerahan tenaga kerja petani (Ismail, 2019), dan jutaan petani kakao tetap mengerjakan pekerjaan yang paling berat dengan nilai tukar yang paling rendah dalam rantai nilai produksi kakao (Hafid, 2017). Meskipun begitu, PT. IAG menilai keberadaan tengkulak resmi memudahkan proses keterlacakan biji kakao sertifikasi, sehingga mereka juga berhak diganjar sejumlah premi yang dipotong dari setiap kilogram biji kakao sertifikasi. Untuk menjamin keterlacakan, petani sertifikasi tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual biji kakao sertifikasinya kepada tengkulak lokal, kecuali tengkulak lokal yang terintegrasi secara resmi dengan PT. BSS.

Menurut Baran dan Sweezy dalam Suwandi (2022), kapitalisme bergerak dari model relasi pasar yang bebas dan kompetitif menuju pasar yang monopolistik. Jatuhnya produktivitas biji kakao nasional berdampak pada kurangnya ketersediaan pasokan secara global, sehingga perusahaan multinasional terdorong untuk mengamankan rantai pasok biji kakao di level hulu melalui skema sertifikasi. Sebagai akibat, petani kakao sertifikasi di Desa Piriang Tapiko kini terikat dalam relasi pasar yang monopsonistik di bawah kontrol Nestle sebagai perusahaan inti. Nestle, lewat program *cocoa plan*-nya, mematok 4000 hingga 5000 ton pasokan biji kakao bersertifikasi RA dari petani-petani sertifikasi di Sulawesi Barat yang terkonsentrasi di Kabupaten Polewali Mandar. Melalui mekanisme alih daya (*outsourcing*), Nestle menjalin kerjasama dengan PT. Papandayan Cocoa Industry (Barry Callebaut), sebagai penjual resmi yang bertanggungjawab untuk memastikan biji kakao yang dipasok dari petani sertifikasi di Desa Piriang Tapiko, yaitu biji kakao yang telah melalui standar pertanian berkelanjutan. BC menggunakan pekerja alih daya dari PT. IAG, perusahaan penyedia jasa fasilitator lapangan (*internal management system*) yang ditugaskan untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan sertifikasi di level petani.

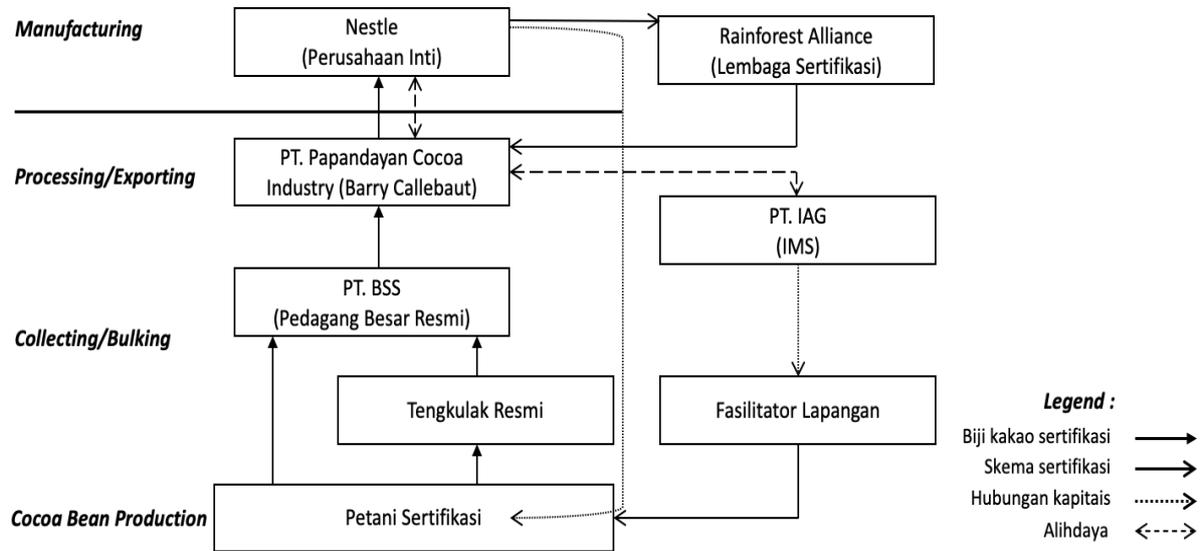
Simpul (*notes*) yang terbentuk dari fragmen-fragmen alih daya dengan tugas-tugas yang berbeda dalam rantai pasok komoditas kakao ini menjadi ciri utama bagaimana perekonomian global bekerja saat ini (Suwandi, 2022). Melalui proses ini,

Nestle dapat memegang kendali rantai nilai dan mengamankan ketersediaan pasokan dengan menanggung risiko yang paling sedikit serta *cost* yang lebih efisien. Dengan alih daya, Nestle tidak perlu menanggung masalah-masalah teknis pada simpul-simpul produksi di tingkat bawah, namun ia dapat mengontrol proses kerja melalui penerapan standar kepatuhan yang ditetapkan RA dan kemudian di operasionalisasikan oleh PT. IAG. Tren semacam ini, sebenarnya bukan suatu hal yang aneh dalam rumus kapital yang dikemukakan oleh Marx. Bahkan jika nilai kapital konstan (alat-alat produksi) adalah nol (0), ini tidak akan berarti apa-apa. Nilai lebih (*surplus value*) adalah semata-mata hasil valorisasi dari kapital variabel (tenaga kerja), yakni pencurian waktu kerja lebih para pekerja dalam proses produksi (Marx, 2004). Dalam hal ini, Nestle sama sekali tidak memerlukan alat-alat produksi seperti tanah dan perkakas kerja. Tentu saja, dalam konteks agraria, hubungan kapitalis terbentuk dari pemisahan petani dari tanahnya. Namun, pemisahan semacam itu tidak diperlukan, selama Nestle dapat mengontrol proses kerja dan mencaplok margin keuntungan yang tinggi dari petani sertifikasi (kapital variabel) melalui relasi premi dan standar kepatuhan.

Sementara itu, hubungan kapitalis juga terbentuk antara PT. IAG dengan kelas pekerja yang mereka pekerjakan sebagai fasilitator lapangan alih daya. Berdasarkan tupoksinya, FL secara rutin melakukan inspeksi dan penyuluhan GAPs secara langsung dan rutin kepada petani kakao sertifikasi. Pada praktiknya, seorang FL dapat mendampingi 200 hingga 250 petani kakao sertifikasi. Rasio yang timpang itu mengakibatkan beban kerja yang terlalu berat dengan upah yang minimum. Di sisi lain, FL juga menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan konsep-konsep teknis yang terbilang rumit dari dokumen pedoman sertifikasi ke dalam tata bahasa petani sehari-hari. Akibatnya, masyarakat Piriang Tapiko lebih familiar dengan istilah "program bonus" ketika merujuk pada istilah "sertifikasi". Penggunaan istilah ini dianggap lebih efektif untuk mempengaruhi petani lokal, agar mau terlibat dalam program sertifikasi ketimbang menggunakan istilah-istilah teknis yang sulit dipahami.

Petani sertifikasi memaknai skema ini sekadar hubungan bonus, yakni bentuk murah hati perusahaan kepada mereka karena telah terlibat dalam menciptakan iklim kakao keberlanjutan. Meski pada dasarnya, sertifikasi adalah skema pengerahan rezim tenaga kerja dengan cara yang paling efisien, melalui cara ini, perusahaan dapat meraup margin keuntungan yang lebih tinggi. Skema ini memungkinkan Nestle untuk menekan ongkos produksi pada komponen tenaga kerja dengan membebaskan seluruh aktivitas produksi kepada BC dan PT. IAG tanpa kehilangan kontrol atas proses kerja. Semakin ditarik ke hulu rantai nilainya, beban kerja semakin tinggi, distribusi nilai semakin kecil, diskrepansi antara curahan tenaga kerja dan nilainya semakin melebar hingga pada titik nilai kapital variabel mencapai *zero*. Sementara itu, meski di bawah kontrol kerja, biaya pada komponen alat

produksi, terkhusus input pertanian justru dibebankan sepenuhnya kepada petani sertifikasi.



**Gambar. 3 Hubungan Pasar Monopsonistik dalam Rantai Pasok Biji Kakao Sertifikasi**

Sumber: Olahan Data Lapangan (2022)

Praktik semacam ini menjadi medium pertarungan kelas di antara petani. Petani kecil menengah sertifikasi memiliki potensi yang sangat kecil untuk memenuhi standar keberlanjutan, karena memerlukan biaya produksi yang tidak sedikit. Sementara itu, petani menengah yang lebih sejahtera memiliki kapasitas untuk menggerakkan modal, sehingga dapat mematuhi kriteria sertifikasi. Skema ini bahkan tidak memiliki dampak positif yang sepadan terhadap nilai tukar petani. Dalam hal tertentu (kepastian pasar dan premi), skema ini memiliki sedikit sisi positif bagi petani, namun sertifikasi tidak selalu mengenai kesejahteraan kelas pekerja (Suwandi, 2022). Sejumlah petani sertifikasi di Desa Piriang Tapiko menilai, bahwa skema sertifikasi belum dapat menyelesaikan masalah mendasar: kesejahteraan dan produktivitas. Di sisi lain, mereka berhitung: premi memang tidak menyelesaikan masalah mendasar, tapi ia tidak lebih buruk daripada tidak mendapatkan apa-apa sama sekali.

## E. KESIMPULAN

Kehadiran tanaman kakao telah menjerat petani kakao di Desa Piriang Tapiko dalam apa yang Henry Bernstein sebut sebagai komodifikasi subsistensi. Meski begitu, ketergantungan terhadap komoditas global ini tidak lantas menundukkan mereka pada diferensiasi kelas, sebagaimana yang diyakini oleh sejumlah cendekia marxis. Tanah hutan yang subur dan norma-norma tradisional yang masih bertahan telah membentuk karakter mereka yang otonom dan lentur terhadap dinamika pasar domestik yang relatif bebas. Anjloknya produktivitas kakao akibat serangan penyakit tanaman sejak lebih dari satu dekade terakhir ini, serta penataan ulang tata kelola

kakao melalui intervensi swasta telah memisahkan petani kakao Desa Piriang Tapiko dari kontrol alat produksi dan hasil kerjanya. Sehingga hal itu menjerat mereka ke dalam hubungan kapitalis yang tersamar (*concealed capitalist relation*) sebagai tenaga kerja cuma-cuma (*unpaid labor*) melalui mekanisme alih daya yang dikontrol secara hierarki oleh Nestle dalam rantai komoditas kakao sertifikasi. Temuan ini menambah keunikan trajektori perkembangan kapitalisme di berbagai konteks yang beragam. Terlepas dari keberagaman itu, sebagaimana yang telah diprediksi oleh Lenin (1977), "petani tidak hanya mengalami diferensiasi, tetapi sepenuhnya larut, menghilang, dan digantikan oleh entitas yang benar-benar baru, yakni sebuah kelas produsen komoditas pertanian atau pekerja upah pertanian."

#### F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Sulawesi Barat atas dukungan melalui program hibah penelitian skema pembiayaan penelitian dosen pemula, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alliance, Rainforest. (2023). *Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance: Pedoman Rantai Pasok*. Rainforest Alliance.
- Araghi, Farshad A. (1995). Global Depeasantization, 1945-1990. *The Sociological Quarterly*, 36 (2), 337-368. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1995.tb00443.x>.
- Bachriadi, Dianto. (1995). *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital*. Bandung: Akatiga.
- Banaji, Jairus. (1977). Modes of Production in a Materialist Conception of History. *Conference of Socialist*, 1 (3), 1-44. <https://doi.org/10.1177/030981687700300102>.
- Bernstein, Henry. (2006). Is There an Agrarian Question in the 21st Century. *Canadian Journal of Development Studies*, 27 (4), 449-460. <https://doi.org/10.1080/02255189.2006.9669166>.
- Bernstein, Henry. (2009). V.I. Lenin and A.V. Chayanov: looking back, looking forward. *The Journal of Peasant Studies*, 36 (1), 55-81. <https://doi.org/10.1080/03066150902820289>.
- Bernstein, Henry. (2019). *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria* (edisi revisi). Insist Press.
- Byres, T.J. (1997). Agrarian Transition and the Agrarian Question. *The Journal of Peasant Studies*, 4(3), 258-274. <https://doi.org/10.1080/03066157708438024>.
- Byres, T.J. (1986). The Agrarian Question of Capitalist Agrarian Transition and the State: An Essay with Reference to Asia. *Social Scientist*, 14 (11/12), 3-67. <https://doi.org/10.2307/3517162>.
- Chayanov, A. V. (1966). *The Theory of Peasant Economy*. The American Economic Association: Homewood, Illinois.
- Habibie, Muchtar. (2022). Extracting labour from the neighbour: class dynamics of agrarian change in Sumatran oil palm. *The Journal of Peasant Studies*, 50 (4), 1317-1346. <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2026330>.
- Hafid, Hiswaty. (2017). *Sustainability and economic governance: Reconfiguring cocoa-chocolate production networks in Indonesia*. [unpublished Phd Dissertation]. University of Sydney.

- Hall, Derek, Philip Hirsch, & Tania Murray Li. (2020). *Kuasa Eksklusi: Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*. INSIST Press.
- Ismail, Sriwiyata. (2019). *The Dynamics of Sustainability Certification Scheme on The Ground Level of Cocoa Global Value Chain in Sulawesi Barat, Indonesia*. [unpublished Master Theses]. Queen Mary University of London.
- Kautsky, Karl. (1988). *The Agrarian Question* Vol. 1, edisi terjemahan dari Die Agrarfrage [1899]. Zwan Pub.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Lenin, V. I. (1977). *The Development of Capitalism in Russia*. Moscow: Progress Publishers.
- Li, T. M. (2002). Local Histories, Global Markets: Cocoa and Class in Upland Sulawesi. *Development and Change*, 33 (3), 415-437. <http://dx.doi.org/10.1111/1467-7660.00261>.
- Li, Tania Murray. (2016). *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Marjin Kiri.
- Li, Tania Murray. (2019). *Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Marjin Kiri.
- Mappatunru, A. (2020). *Pembentukan Kelas Petani dalam Dinamika Lokal Industri Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah*. [unpublished paper].
- Marx, Karl. (2004). *Capital* Vol. 1. Hasta Mitra.
- Monde, A. (2009). Degradasi stok karbon (C) akibat alih guna lahan hutan menjadi lahan kakao di Das Nopu, Sulawesi Tengah. *Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, 16 (2), 110-117.
- Neilson, Jeffrey. (2008). *Program Gerakan Nasional Percepatan Revitalisasi Kakao Sulawesi (GERNAS): Masukan strategis dari Cocoa Sustainability Partnership (CSP)*. Jakarta: Askindo dan Australian Indonesia Partnership.
- Nino, Helena Perez & Carlos Oya. (2021). Contract Farming: agricultural producers at the crossroad of contemporary agri-food system. In: Akram-Lodhi, A. H., Dietz, K., Engels, B., & McKay, B. M. Eds. *Handbook of Critical Agrarian Studies*. Edward Elgar Publishing.
- Palinrungi, Rafiuddin. (2016). *The institutional interests of upgrading agents in the Indonesian cocoa value chain*. [unpublished Phd Dissertation]. University of Sydney.
- Ploeg, Jan Douwe Van Der. (2019). *Petani dan Seni Bertani: Maklumat Chayanovian*. Insist Press.
- Ruf, F. (1998). *Cocoa: from Deforestation to Reforestation*. <http://nationalzoo.si.edu/conservationandscience/migratorybirds/research/cacao/ruf.cfm>.
- Scott, James C. (1983). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3S.
- Suwandi, Intan. (2022). *Rantai Nilai: Wajah Baru Imperialisme Ekonomi*. Penerbit Independen.
- W. Lawrence Neuman. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Edisi 7). Indeks.